

Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan

Robik Atul Adawiyah¹, Deby Febriyan Eprilianto²

¹²Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Keywords

Stakeholders Role, Marine Tourism, Port of Pasuruan City



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of marine tourism at the Port of Pasuruan, carried out by stakeholders in this study, is based on collaboration between the government and state-owned enterprises (BUMN) as a means of equitable regional potential development. However, several issues remain in its implementation. The aim of this study is to examine the roles of stakeholders in the development of marine tourism based on five role dimensions (policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator). This study uses a descriptive qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation, followed by data analysis using reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the development of marine tourism has made progress through the active roles of stakeholders. The Secretary of State (Sekda) and PT Pelindo play the role of policy creators, but the involvement of relevant OPDs (regional work units) needs to be strengthened through formal agreements (PKS) to avoid role imbalances. The coordination role performed by Sekda, Dishub, and PUPR needs to be improved, especially regarding accessibility and parking. The facilitation role carried out by Sekda, Dispora, and Pelindo includes training and providing facilities, although the front area of the

port still requires infrastructure improvements. Dispora and other OPDs are active as implementors, but pedestrian facilities remain suboptimal. As accelerators, Sekda and Dispora have succeeded in speeding up tourism promotion and education, although information dissemination is limited due to the low digital literacy of the local community. It is expected that the Pasuruan City Government will optimize the cooperation agreements to include all stakeholders, strengthen coordination among OPDs with clear technical regulations and task divisions, and improve facilities and promotional strategies, both digital and conventional, so that the development of marine tourism at the Port of Pasuruan can become more inclusive and sustainable.

ABSTRAK

Pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan yang dijalankan oleh para stakeholders dalam penelitian ini yang berlandaskan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN sebagai wujud pengembangan potensi daerah yang merata namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholders dalam pengembangan wisata bahari berdasarkan lima dimensi peran (policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu data dianalisis menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari menunjukkan kemajuan melalui peran aktif stakeholders. Sekda dan PT Pelindo berperan sebagai policy creator, namun pelibatan OPD perlu diperkuat melalui PKS untuk menghindari ketimpangan peran. Peran koordinasi yang dijalankan oleh Sekda, Dishub, dan PUPR perlu ditingkatkan, terutama terkait aksesibilitas dan parkir. Peran fasilitator dijalankan oleh Sekda, Dispora, dan Pelindo memberikan pelatihan dan fasilitas, meskipun area depan pelabuhan masih perlu peningkatan sarana prasarana. Dispora dan OPD lain aktif sebagai implementor, namun fasilitas pedestrian belum optimal. Sebagai akselerator, Sekda dan Dispora berhasil mempercepat promosi dan edukasi wisata, akan tetapi penyebaran informasi terbatas oleh rendahnya literasi digital masyarakat. Diharapkan adanya optimalisasi Pemerintah Kota Pasuruan perlu menyempurnakan dokumen perjanjian kerja sama agar mencakup seluruh stakeholders melakukan koordinasi antar OPD harus diperkuat dengan regulasi teknis dan pembagian tugas yang jelas serta penguatan fasilitas dan strategi promosi wisata, baik digital maupun konvensional, agar pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah diterapkan secara luas di negara-negara lain selain Indonesia. Hal tersebut dikarenakan otonomi daerah dapat memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola daerah mereka sendiri, termasuk perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerah mereka sehingga akan lebih mampu berkembang dengan otonomi yang diberikan (Ristanti, 2015). Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang diluar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Otonomi daerah perlu dilakukan agar tidak terulang seperti pada masa orde baru, yang menyebabkan pemerintahan menjadi terpusat seperti di Pulau Jawa, pembangunan infrastruktur, ekonomi menjadi tidak merata. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya masing – masing. Mengingat bahwa pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya memiliki fungsi yang sama hanya dibedakan oleh cakupan kekuasaan dan kewenangan masing – masing dan bersifat saling melengkapi.

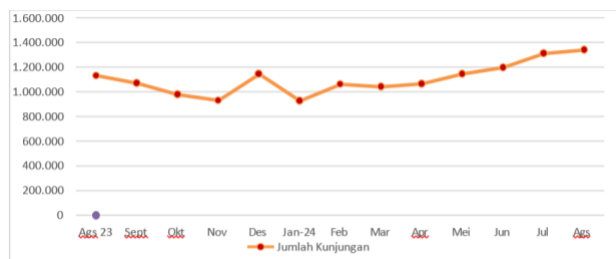
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan lain (Hsb dan Julianthy, 2014). Dasar dari adanya hubungan kewenangan ini adalah adanya penyerahan, pengakuan, ataupun adanya pembiaran dari suatu urusan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah. Pembagian urusan tersebut meliputi urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren yang dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat dan daerah dimana meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah (Andrea, 2020). Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi. Masing-masing daerah dapat memilih sendiri urusan pemerintahan ini dan tidak harus menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sekiranya daerah yang bersangkutan tidak memiliki potensi mengembangkan salah satunya pada bidang pariwisata (Jazuli dan Eprilianto, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang besar. Dapat dilihat pada keanekaragaman flora fauna, sumber daya alam dan kebudayaan yang memiliki keunikannya sendiri (Syahputra dan Ma'ruf, 2020). Keanekaragaman bentuk dari sektor pariwisata di Indonesia memunculkan berbagai konsep dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam mengembangkan sektor pariwisata memerlukan sinergi berbagai pihak. seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan *stakeholder* terkait. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata merupakan ragam aktivitas wisata dengan dilengkapi akomodasi sarana dan prasarana, serta layanan dari pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya (Agustiningsih et al., 2020). Dalam hal ini pariwisata menjadikan obyek wisata yang diharapkan berdaya saing untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rasyid dan Darumurti, 2022).

Selain itu, untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus untuk sektor pariwisata. Berdasarkan pada Data Kementerian Pariwisata tahun 2018 menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi sektor ekonomi paling penting di Indonesia sejak 2013, menempati posisi keempat setelah minyak, batubara, dan kelapa sawit (Talib, 2021). Sehingga dapat dipahami bahwa potensi sektor pariwisata cukup tinggi untuk mendorong serta meningkatkan pembangunan, meningkatkan sumber pendapatan masyarakat maupun pendapat asli daerah apabila dikelola dengan maksimal (Syahputra dan Ma'ruf, 2020).

Namun dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang nyata namun pemerintah masih banyak menghadapi kendala. Kendala yang utama adalah infrastruktur, konektivitas dan transportasi (Bramana, 2018). Pembangunan pariwisata dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan (Gillovic dan McIntosh, 2015). Hal ini tentunya sejalan dengan wewenang pemerintah daerah pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang daerah mengembangkan potensi daerah. Pengembangan pariwisata yang berorientasi pelestarian budaya, alam dan profit akan meningkatkan pendapatan asal daerah (PAD) karena pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan (Yesayabela et al., 2024). Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, semua *stakeholder* harus berpartisipasi secara aktif. Pemerintah dan masyarakat adalah dua *stakeholder* utama dalam pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata, dengan peran pemerintah sangat

terbatas. Sehingga masyarakat merupakan peran utama dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata (Talib, 2021).



Gambar 1. Data Statistik Kunjungan Wisata Mancanegara Bulan Agustus 2024 di Indonesia

Sumber : Diolah Peneliti, Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut jumlah kunjungan wisatawan naik secara signifikan pada bulan Agustus 2024. Kenaikan sebesar 18,30% lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus 2023, dan kenaikan sebesar 2,23% dari bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan setiap bulan pada sektor pariwisata. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi pengembangan dan pengelolaan wisata yang mumpuni (Jazuli dan Eprilianto, 2024). Namun dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang nyata namun pemerintah masih banyak menghadapi kendala. Kendala yang utama adalah infrastruktur, konektivitas dan transportasi (Bramana, 2018). Sehingga dalam pengembangan pariwisata perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Salah satu tindakan positif yang diambil oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah mengembangkan potensi daerah dalam industri pariwisata. Setiap daerah akan berusaha menonjolkan keunikan dan keunggulannya di bidang pariwisata. Pariwisata yang berkembang dengan memanfaatkan peluang akan memungkinkan pertumbuhan sektor pariwisata lokal (Agustiningsih et al., 2020). Di beberapa daerah di Indonesia yang kerap melakukan optimalisasi pariwisata yaitu Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai macam keindahan dari wisata alam maupun wisata buatan. Dengan keanekaragaman yang disuguhkan tentunya memerlukan pengelolaan yang optimal (Bramana, 2018). Berikut disajikan data peningkatan pariwisata di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2 Statistik Peningkatan Kunjungan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur

Sumber : BPS Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan pada data diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur sempat mengalami keterpurukan pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun berhasil bangkit pada tahun 2023 dengan peningkatan yang signifikan. Dengan demikian dapat dilihat adanya peluang yang cukup besar di sektor pariwisata Provinsi Jawa Timur. Melihat peluang tersebut beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur turut andil mengembangkan potensi daerahnya masing-masing (Jazuli dan Eprilianto, 2024). Sehingga dalam mengembangkan potensi daerah tentunya tidak lepas dari adanya peran pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Stakeholder merupakan individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi oleh kegiatan atau program pembangunan. *Stakeholder* adalah setiap bagian masyarakat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan atau program pembangunan dan memiliki kepentingan atau keterlibatan dengan kegiatan atau program tersebut. Keterlibatan ini berdampak pada program pembangunan (Talib, 2021). Peran penting keterlibatan pemangku kepentingan sebagai inisiatif pariwisata berkelanjutan sedang ditanggapi

baik di dunia akademis maupun industri. Hal ini disebabkan oleh peran pemangku kepentingan yang saling bergantung dan berpengaruh di destinasi pariwisata yang bergantung pada sinergi dan kolaborasi *stakeholder* (Gravitiani et al., 2022). Membangun peran *stakeholder* dapat dilakukan melalui pola kerjasama sukarela dan kemitraan mutualistik, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kegiatan kerjasama (Irawan et al., 2022). Peran yang dijalankan oleh setiap *stakeholder* tentu akan berbeda-beda, dan terdapat *stakeholders* yang memiliki peran lebih dari satu (Febrianti dan Eprilianto, 2023). Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa pengembangan potensi daerah seperti pada Provinsi Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari peran *stakeholder* terkait. Oleh karena itu, beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur kerap melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah seperti kerja sama pengelolaan mata air Umbulan Winongan Pasuruan, kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah, Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya, kerja sama Kota Malang dan Kota Batu dalam pengelolaan sumber daya air, dan salah satunya kerja sama di Kota Pasuruan dengan PT. Pelindo Regional III dalam pengembangan wisata bahari.

Wisata bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata baik yang dilakukan di atas permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut (Masjhoer, 2020). Sehingga dapat dipahami bahwa wisata bahari merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke kawasan pesisir dan laut untuk melakukan berbagai kegiatan di wilayah laut maupun daratan sekitarnya. Tujuannya meliputi rekreasi, hiburan, pengembangan diri, serta interaksi dengan budaya lokal dalam kurun waktu tertentu. Definisi ini menekankan bahwa segala bentuk aktivitas yang melibatkan perjalanan sementara di ekosistem pesisir dan laut, serta memiliki unsur kegiatan wisata, dapat dikategorikan sebagai wisata bahari.

Kota Pasuruan memiliki potensi wisata bahari yang layak untuk dikembangkan karena Kota Pasuruan merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Pasuruan yang strategis di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota di Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan jalur laut. Kota Pasuruan memiliki peranan penting pada pelabuhannya. Selain dikenal sebagai kota pesisir yang strategis, Pemerintah Kota Pasuruan berharap potensi pelabuhan Pasuruan juga dapat dikembangkan pada sektor pariwisatanya yang sempat mengalami mati suri. Infrastruktur fisik yang terbatas dan ruang lingkup kegiatan pariwisata yang terbatas merupakan karakteristik utama yang dihadapi oleh bisnis pariwisata di daerah pinggiran (Carlisle et al., 2013). Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pasuruan. Objek pariwisata Kota Pasuruan sangat beragam mulai dari wisata buatan, wisata religi, hingga wisata bahari.

Tabel 1 Objek Wisata Kota Pasuruan

No.	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata (Kecamatan)
1.	Kampung Wisata Lansia Tangguh	Desa Wisata	Purworejo
2.	Bangilan Kampung Lawas	Desa Wisata	Panggungrejo
3.	Wisata Heritage Kanya	Desa Wisata	Panggungrejo
4.	Wisata Tematik Mangrove	Desa Wisata	Panggungrejo
5.	Pasar Meubel Bukir	Buatan	Gadingrejo
6.	Museum Gula Indonesia P3GI	Buatan	Panggungrejo
7.	Taman Lansia	Buatan	Purworejo
8.	Taman Baca Pesisir	Buatan	Panggungrejo
9.	Taman Kota	Buatan	Bugul Kidul

10.	Taman Hayati	Buatan	Gadingrejo
11.	Taman Pekuncen	Buatan	Panggungrejo
12.	Taman Sekargadung	Buatan	Bugul Kidul
13.	Makam K.H Abdul Hamid	Religi	Panggungrejo
14.	Klenteng Tjoe Tik Kiong	Religi	Gadingrejo
15.	Makam Untung Suropati	Religi	Purworejo
16.	Pelabuhan Kota Pasuruan	Bahari	Panggungrejo
17.	Kolam Renang Tirta Kencono	Tirta	Panggungrejo
18.	Kolam Renang Tirta Citra Indah	Tirta	Gadingrejo

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi, dan Teknologi Kota Pasuruan, Tahun 2024 (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel tersebut, Kota Pasuruan memiliki sebanyak 18 objek wisata yang terdiri dari Wisata Buatan, Desa Wisata, Wisata Religi, Wisata Tirta, serta satu objek Wisata Bahari. Banyaknya destinasi wisata yang tersedia, harus dibarengi dengan pengelolaan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Terutama Wisata Bahari Pemerintah Kota Pasuruan hanya memiliki satu, tentunya pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dalam hal pendirian usaha pariwisata. Usaha-usaha yang dapat dijalankan dapat berupa daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, jasa pramuwisata, dan memanfaatkan potensi wisata yang ada dan menyejahterakan masyarakat sekitar (Meilani et al., 2022).

Dilansir dari laman website resmi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Pasuruan, Wali Kota Pasuruan Gus Ipul menyampaikan keinginannya untuk menciptakan kawasan pelabuhan Tanjung Tembikar yang bersih, tertib, ramah anak, memajukan ekonomi masyarakat serta memajukan pengembangan wisata bahari di Kota Pasuruan. Pelabuhan Kota Probolinggo lebih bersih dan tertib itu yang saya impikan untuk Kota Pasuruan enak dan nyaman maka kita koordinasi dengan PT. Pelindo apa kira kira yang bisa kita lakukan masuk sini nyaman at home. Sekarang sistem nya cepat bagaimana menyajikan kawasan bahari menjadi wisata untuk keluarga di kawasan pelabuhan Kota Pasuruan” (Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik diakses 23 Oktober 2024)

Pelabuhan Tanjung Tembikar sangat berpotensi untuk dikembangkan karena merupakan satu – satunya wisata bahari dan ikon Kota Pasuruan akan tetapi, belum dioptimalkan dengan baik dan sempat mengalami mati suri sedangkan, Kota Pasuruan pada jalur strategis laut dan menjadikannya sebagai jalur perdagangan. Namun, Wali Kota Pasuruan berharap selain pada sektor ekonomi atau perdagangan perlu dikembangkan di sektor pariwisata baharinya seperti pada kota atau kabupaten lainnya.

Tabel 2 Data Jumlah Wisatawan Kota Pasuruan

Objek Wisata (Tourism Object)	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)
Kawasan Wisata Sekitar Alun - alun	-	1.448.592
Kolam Renang Tirta Kencono	2	21.258
Taman Sekargadung	-	10.147
Taman Pekuncen	-	8.908
Pelabuhan Kota Pasuruan	-	6.611
Gedung P3GI	19	6.224

Makam Mbah Slagah	-	3.671
Klenteng Tjoe Tik Kiong	28	810
Petilasan Untung Suropati	-	436

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan, Tahun 2024 (diolah peneliti)

Berdasarkan pada gambar tabel di atas wisata Pelabuhan Kota Pasuruan mengalami kenaikan dari mati surinya namun, masih mengalami ketertinggalan dibandingkan wisata lainnya. Pada dasarnya pemanfaatan peluang pariwisata yang menguntungkan diperlukan usaha yang tepat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberi dampak langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata di Kota Pasuruan perlu adanya sinergi peran pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Peran *stakeholder* merupakan semua pihak yang terlibat yang mempunyai hubungan secara langsung dalam upaya pengembangan pengelolaan objek pariwisata bahari pada Pelabuhan Kota Pasuruan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pasuruan berkoordinasi bersama PT. Pelindo III dalam pengembangan infrastruktur wisata bahari. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerja Sama Daerah yang didalamnya terdapat tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Sejalan dengan peraturan tersebut maka terjadi proses kerja sama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT. Pelindo Regional III yang dalam prosesnya terlibat beberapa *stakeholder* lainnya.



Gambar 3 Pemerintah Kota Pasuruan Kunjungan ke PT. Pelindo Regional III

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi, dan Teknologi Kota Pasuruan, Tahun 2022

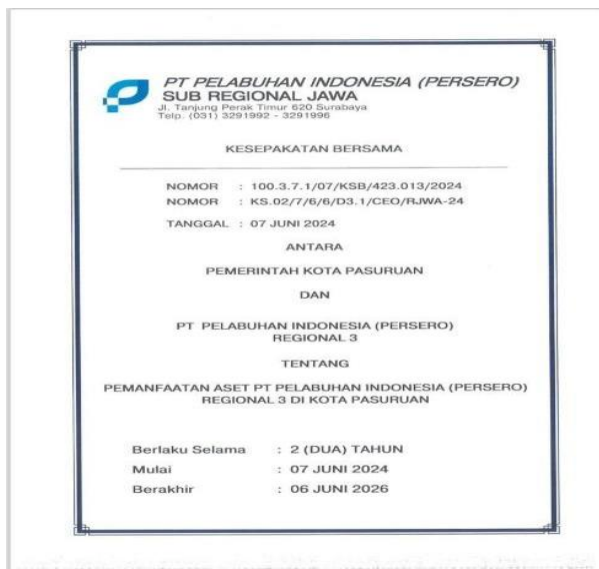
Gambar diatas menjelaskan mengenai kunjungan, Wali Kota Gus Ipu didampingi Pj. Sekda, Asisten II, Asisten III, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala DPUPR, serta Kabag Pemerintahan dan Kerja Sama Sekda Kota Pasuruan. Dalam kunjungan tersebut berjalan dengan baik

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan tujuan kerja sama tersebut selain untuk memperbaiki infrastruktur di Kota Pasuruan yang masih wilayah Pelindo juga untuk memenuhi visi dari Bapak Wali Kota Gus Ipu, membangun wisata Bahari dan memajukan UMKM setempat. Untuk pertemuan terkesan jarang dilakukan karena kesibukan masing-masing, untuk menghindari kesalahan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) ketika membahas draft kerja sama. Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan bersama Bu Puri Permatasari selaku Kepala Bagian Pemerintahan dalam penjelasannya sebagai berikut: “sebelumnya kita pernah kerja sama dengan Pelindo tapi yang kerja sama DPUPR, namun tetep untuk komunikasinya makanya dibentuk TTKSD. Sebelum di tanda tangani kita itu dari Sekda bahas draft nya sama tim TTKSD tadi untuk menghindari misskom karena kurang ketemu satunya sibuk satunya luang gitu, terus teknisnya diserahkan ke OPD terkait gitu sama Pelindo” (Wawancara 29 Oktober 2024)

Dari penjelasan diatas diketahui adanya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk memudahkan proses komunikasi kedua belah pihak. Karena ini termasuk salah satu proyek besar di Kota Pasuruan maka perlu dilakukan dengan maksimal dan teliti. “Sekda cuma memfasilitasi prosesnya kayak penandatanganan MoU dan kemarin baru pembaruan perpanjangan, awalnya berakhir sampai 2024 terus diperpanjang lagi karena masih banyak kurangnya itu Mba. Setiap dinas terkait mendapatkan PKS tetapi memang beberapa dinas hanya sebagai pendukung dalam kerja sama ini mba”. (Wawancara 29 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, pihak Sekretariat Daerah Kota Pasuruan menjelaskan bahwa tupoksinya hanya seputar draft kerja sama dan memfasilitasi proses kerja sama tersebut untuk teknis diserahkan kepada dinas – dinas terkait,

serta terdapat perpanjangan kontrak dengan PT. Pelindo Regional III karena masih terdapat kekurangan dari hasil kerja sama tersebut itu, setiap dinas yang terlibat diberikan PKS dengan PT. Pelindo Regional III.



Gambar 4 Draft Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III

Sumber: Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan, Tahun 2024

Berdasarkan pernyataan diatas, terjadi perpanjangan kontrak kerja sama Pemerintah Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III mengenai Pelabuhan Kota Pasuruan yang sebelumnya sudah berakhir dan saat ini sedang dalam proses diperpanjang 2 tahun kedepan hingga 2026. Untuk itu perlu adanya pembahasan lanjut dalam perpanjangan kontrak kerja sama tersebut. Dalam proses pembangunan sempat terjadi hambatan seperti perubahan teknis pembangunan dermaga pelabuhan selain itu belum dibangun toilet dan tempat ibadah yang saat ini banyak banyak dikeluhkan masyarakat, hal ini disampaikan oleh Bapak Gustap selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan sebagai berikut : “Kalau dari DPUPR ini kan penyelenggara teknisnya, kemarin memang sempat ada perubahan kesepakatan pelebaran dermaga dari 2,3 meter jadi 3 meter tapi belum sempat dilakukan dan jadinya cuma perbaikan jalan untuk tempat ibadah sama toilet memang belum terlaksana.” (Wawancara 7 November 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pelebaran dermaga tidak dilakukan dan diubah hanya perbaikan jalan dari kesepakatan yang telah disetujui. Dapat dipahami pada proses perbaikan dan pengembangan pada wilayah Pelabuhan belum optimal karena belum terselesaikan sepenuhnya seperti belum terbangunnya objek wisata penunjang yaitu toilet dan tempat ibadah hingga saat ini.

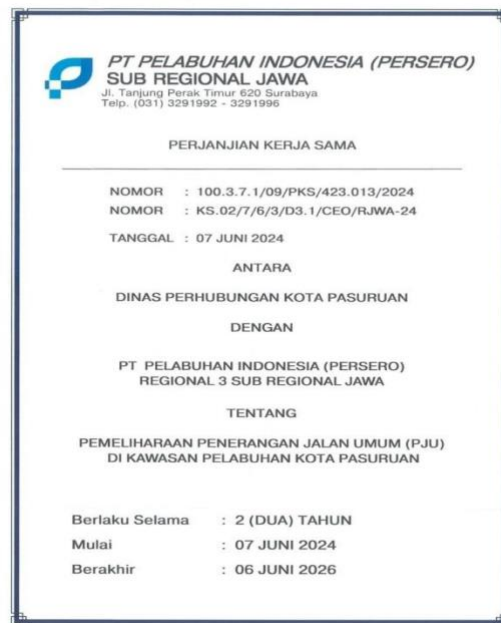
- Pasal 1**
MAKSUD DAN TUJUAN
- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama terkait Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Pelabuhan Kota Pasuruan untuk Destinasi Wisata.
 - (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Pelabuhan Kota Pasuruan untuk Destinasi Wisata.
- Pasal 2**
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi aset-aset milik **PIHAK KEDUA** yang berada di lokasi Kegiatan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Pelabuhan Kota Pasuruan untuk Destinasi Wisata.
 - (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam hal:
 - a. Kegiatan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - b. Peningkatan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar;
 - c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung;
 - d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Gambar 5 Perjanjian Kerja Sama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III

Pernyataan tersebut diperkuat dengan perjanjian kerja sama diatas dapat dilihat seharusnya

terdapat sarana dan prasarana pendukung seperti toilet dan tempat ibadah yang dibangun. Namun, hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Hal tersebut menimbulkan adanya indikasi seperti kurangnya dana dalam proses pembangunan. Selanjutnya, Bu Sukma Mira Nurdiana selaku Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda yang turut serta saat teknis di lapangan menambahkan sebagai berikut: "Sebenarnya untuk tempat ibadah dan toilet ini kan termasuk bangunan penunjang wisata dalam PKS, tapi memang belum terealisasi karena kurang dana juga, saat teknis dibantu Dishub kok itu bagian penerangan jalan umum nya, tapi untuk PT. Pelindo hanya menerima hasilnya untuk semuanya full dari Pemerintah Kota Pasuruan" (Wawancara 14 November 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, pihak DPUR menjelaskan bangunan penunjang seperti toilet dan tempat ibadah belum rampung dikarenakan kekurangan dana dan dari pihak Dinas Perhubungan turut berperan dalam penerangan jalan umum sedangkan menurut DPUPR dari pihak PT. Pelindo belum terlihat kontribusinya. Hal ini diperkuat dengan adanya PKS antara PT. Pelindo dengan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan



Gambar. 6 Perjanjian Kerja Sama Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III

Sumber : Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan, Tahun 2024

Adapun permasalahan lain terkait pembagian tugas atau peran dari masing-masing aktor yang terlibat seperti pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai salah satu pihak yang melakukan kolaborasi dalam pengembangan wisata bahari pada pelabuhan, peneliti tidak menemukan dokumen tertulis yang menyatakan komitmen kerja sama dengan PT. Pelindo Regional III Kota Surabaya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bu Tika Setyaningrum selaku Kepala Bagian Bidang Pariwisata berikut: "Dispora ini ya khusus nya bidang pariwisata sendiri bagian mengembangkan wisata baharinya ya Mba, jadi kita menggali potensinya seperti sewa perahu buat keliling, terus ke wisata mangrovenya gitu nanti untuk biayanya tergantung nelayan, jadi bisa meningkatkan ekonomi mereka gitu loh, cuma untuk saat ini belum terstruktur secara sistematis jadi jarang yang tau belum ada papan wisata perahunya juga karena kita diminta langsung oleh Pemerintah Kota untuk PKS nya tidak ada juga". (Wawancara 12 November 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, untuk Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ternyata belum mendapatkan PKS namun, langsung ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk turut membantu pengembangan wisata bahari di pelabuhan akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan wisata secara terstruktur atau sistematis sehingga potensi wisata bahari belum optimal.

Jika dilihat dari perannya DPUPR dan Dishub merupakan aktor utama dari Pemerintah Kota Pasuruan dan tentu saja hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian tugas dari masing-masing aktor yang terlibat dan seberapa besar peran yang diambil oleh masing-masing aktor dalam melaksanakan pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan karena dalam proses MoU beberapa dinas tidak turut serta didalamnya seperti Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perhubungan namun, kenyataan di lapangan

berbanding terbalik. Selain itu, karena Pelabuhan merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Kota Pasuruan menginisiasi adanya kerja sama dengan PT. Pelindo Regional III.

Sejalan dengan permasalahan diatas terkait pengembangan infrastruktur yang kurang optimal, pengembangan wisata yang kurang terstruktur maupun pembagian peran dari *stakeholders* yang terlibat belum maksimal. Akan tetapi, disamping itu semua dapat dilihat bahwa Kota Pasuruan memiliki banyak peluang untuk menjadi ikon pariwisata regional dan mengangkat kembali pesona Pelabuhan "Tanjung Tembikar". Namun, aspek pengelolaan wisata bahari masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik, seperti yang terlihat dari sarana prasarana pembangunan objek penunjang wisata bahari yang kurang lengkap seperti toilet dan tempat ibadah, selain itu adanya pro-kontra dalam pelebaran dermaga perlu adanya perundingan dari *stakeholder* terkait. Kurangnya peran *stakeholder*, terkesan beberapa *stakeholder* yang turut andil dalam proses pengembangan pariwisata Bahari di Pelabuhan Tanjung Tembikar Kota Pasuruan

Berangkat dari permasalahan diatas, diperlukan solusi untuk mengidentifikasi peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat dan menyelesaikan masalah yang ada. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Bahari (Studi Pelabuhan Kota Pasuruan) Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di uraikan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Bahari (Studi Pelabuhan Kota Pasuruan)? Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran menyeluruh terkait terkait Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran para *stakeholders* dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pandangan dari para informan secara menyeluruh dan kontekstual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai situasi yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian diarahkan untuk menggali dan mendeskripsikan peran berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata bahari, seperti pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak swasta lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Kota Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena memiliki potensi wisata bahari yang sedang dalam proses pengembangan dan melibatkan berbagai *stakeholders* yang berperan aktif dalam proses tersebut.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Pasuruan, pengelola pelabuhan, pelaku usaha wisata setempat, tokoh masyarakat, dan wisatawan yang pernah berkunjung ke kawasan wisata bahari Pelabuhan Kota Pasuruan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat metode utama, yaitu:

1. Wawancara: Dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran, strategi, serta tantangan yang dihadapi *stakeholders* dalam pengembangan wisata bahari.
2. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas di kawasan wisata bahari Pelabuhan Kota Pasuruan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi fisik, interaksi antar *stakeholder*, serta pelaksanaan kegiatan wisata.
3. Studi pustaka: Dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.
4. Dokumentasi: Meliputi pengumpulan data melalui foto, video, brosur, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan:

1. Reduksi data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen menjadi informasi yang bermakna.

2. Penyajian data: Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menarik makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab fokus penelitian dan memverifikasi kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.

Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran stakeholders dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data penelitian yang telah dilakukan pengolahan data, selanjutnya akan dianalisis. Hal ini untuk dapat mengetahui kesesuaian hasil di lapangan pada teori yang digunakan, terlebih untuk mengetahui tindakan atau peran *stakeholders* dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan. Penelitian ini berfokus pada peran *stakeholders* yang terdiri dari lima dimensi yaitu : 1) *policy creator*; 2) *koordinator*; 3) *fasilitator*; 4) *implementor*; 5) *akselerator*. Analisis dimensi ini dapat memperkuat hasil dari data yang telah didapatkan untuk dikaji dengan kesesuaian teori yang digunakan

Pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan tidak terlepas dari adanya campur tangan oleh *stakeholders* daerah. *Stakeholders* yang ikut serta dalam pengembangan wisata bahari di pelabuhan ada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Dinas PUPR, Dispora, Dishub, PT. Pelindo Regional III, dan masyarakat. memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran para *stakeholders* daerah dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan. Dalam konteks ini, terdapat lima peran utama yang dijalankan oleh para *stakeholders*, yaitu sebagai *policy creator*, *koordinator*, *fasilitator*, *implementor*, dan *akselerator*. Peran sebagai **policy creator** atau pembuat kebijakan dijalankan oleh Sekretariat Daerah (Sekda) bersama PT. Pelindo Regional III. Mereka bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis atas kerja sama yang disepakati, termasuk menetapkan Memorandum of Understanding (MoU), menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan daya tarik (*attractions*) dan aksesibilitas (*accessibility*) kawasan wisata bahari.

Selanjutnya, peran sebagai **koordinator** dijalankan oleh Sekda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam peran ini, mereka bertugas menggerakkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, melakukan sosialisasi kebijakan, memastikan pengembangan daya tarik wisata, serta mengoordinasi aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari agar berjalan secara sistematis dan efisien.

Adapun peran **fasilitator**, yang berfokus pada pemenuhan fasilitas barang dan jasa untuk mempermudah proses pelaksanaan program, diemban oleh Sekda, PT. Pelindo III, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Tindakan nyata dari peran ini mencakup pendanaan untuk pelatihan dan pendampingan, rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai daya tarik tambahan bekerja sama dengan Pemerintah Kota, serta penyediaan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan amenities (*amenity*).

Sebagai **implementor**, Dispora, Dinas PUPR, dan unsur masyarakat seperti pelaku wisata, Karang Taruna, serta pelaku UMKM, memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan dan program di lapangan. Mereka mengimplementasikan kegiatan-kegiatan seperti branding wisata bahari, penambahan daya tarik melalui taman baca dan spot foto, peningkatan fasilitas jasa melalui pendampingan, serta penyediaan pelayanan tambahan (*ancillary*) berupa Tourism Information Center (TIC) dan pos keamanan.

Terakhir, peran sebagai **akselerator** atau pendorong percepatan kebijakan diemban oleh Sekda dan Dispora bersama mitra media. Peran ini direalisasikan melalui penggerakan OPD secara masif, promosi wisata bahari melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, penyelenggaraan event atau acara tahunan bersama masyarakat di kawasan pelabuhan, serta penambahan daya tarik melalui kegiatan outing class dan study tour yang melibatkan generasi muda.

1. Policy Creator

Dimensi peran pertama yaitu *policy creator* menurut Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017) pada teori peran *stakeholders* menjelaskan bahwa *policy creator* merupakan peran sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan yang berperan sebagai *policy creator* yaitu Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III. Sekretariat Daerah sebagai turunan dari Pemerintah Kota Pasuruan yang mengadakan kerja sama dengan PT. Pelindo untuk mengembangkan kawasan pesisir pelabuhan menjadi kawasan wisata bahari, sedangkan PT. Pelindo yang membantu mengarahkan mengenai pemanfaatan asetnya oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Pengambil keputusan dan penentu kebijakan jika dilihat dari dimensi pengambilan keputusan yaitu mengambil sebuah keputusan dan menentukan kebijakan membutuhkan sebuah proses yang tidak dapat dilakukan sendirian sehingga lebih mudah dengan adanya kerja sama karena adanya keterbatasan suatu kondisi (Nugroho et al., 2014). Dengan adanya berbagai sumber informasi sebagai bentuk konfirmasi mampu mengatur dan mengawasi keputusan yang diambil (Citraningsih, 2022). Hal ini sejalan dengan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan oleh Sekda Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III, namun dalam hal ini Sekda menjalankan perannya sebagai policy creator lebih dominan sebagaimana Sekda merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan tugas serta misi dari Wali Kota Pasuruan.

Pengembangan wisata bahari di pelabuhan ini didasarkan pada kerja sama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT. Pelindo Regional III dikarenakan permasalahan kawasan sekitar pelabuhan yang kurang dirawat, menghidupkan kembali esensi Pelabuhan Tanjung Tembikar, menambah destinasi wisata dengan memanfaatkan potensi Kota Pasuruan sebagai daerah pesisir, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, hal inilah yang menjadi landasan terbentuknya kerja sama dalam pengembangan wisata bahari. Pernyataan ini didapatkan dari hasil wawancara bersama informan. Dapat dipahami secara tidak langsung pengambilan keputusan oleh Sekda dan Pelindo melalui kerja sama ini mampu mengenalkan, mempromosikan, memperbaiki infrastruktur kota sehingga menambah daya tarik bagi Kota Pasuruan sendiri inilah yang menjadi landasan terbentuknya MoU dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerja Sama Daerah yang didalamnya terdapat tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, upaya kerja sama yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pasuruan mampu membuka partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap potensi yang dimiliki daerahnya namun tetap memperhatikan lingkungannya. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung kerja sama ini berdampak pada peningkatan potensi Kota Pasuruan untuk dapat bersaing dengan daerah lain serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pengambilan keputusan untuk menjalin kerja sama ini didasarkan pada visi dan misi Wali Kota Pasuruan untuk membangun infrastruktur daerah serta menambah daya tarik (*attractions*) sehingga Kota Pasuruan tidak hanya dikenal dengan wisata religinya, namun masih ada potensi lainnya yang perlu dikembangkan lebih dalam. Dengan melalui berbagai pertimbangan dan perizinan sehingga terjalin kerja sama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT. Pelindo III sebagai pemilik asset pelabuhan dibawah naungan Provinsi Jawa Timur. Salah satu terobosan pengembangan daya tarik (*attractions*) yang dipilih adalah pengembangan kawasan pelabuhan melalui pedestrian guna memperbaiki citra pelabuhan itu sendiri di mata masyarakat agar menjadi lebih ramai pengunjung, melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi wisata mangrove, serta menanamkan literasi melalui taman baca. Selanjutnya, peran Sekretariat Daerah sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Wali Kota Pasuruan yang telah meninjau dan menjalin kerja sama dengan Pelindo. Sekda turut mendampingi proses jalannya kerja sama dari awal persuratan atau perizinan, hingga mengoordinir OPD terkait untuk mengeksekusi kerja sama melalui MoU dan PKS yang diberikan kepada OPD terkait. Selain itu, Sekda sebagai OPD yang menjalin komunikasi intens serta sebagai penyambung antara Pelindo dengan *stakeholders* lainnya seperti Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan karena suatu program atau proyek tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya kerja sama dengan *stakeholders* lainnya.

Namun, dalam proses suatu kerja sama tidak selamanya berjalan mulus, adanya hambatan seperti komunikasi baik dengan pihak Pelindo maupun *stakeholders* lainnya karena adanya kesibukan yang berbeda antar instansi. Sedangkan untuk kerja sama ini masih terdapat kekurangan karena OPD yang terlibat tidak seluruhnya diberikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan hanya didasarkan pada perintah dari atasan seperti Dispora yang memiliki peran cukup penting tetapi belum terfasilitasi PKS. Selain itu, PT. Pelindo selaku pemilik asset dalam hal pendanaan belum diatur secara jelas pada MoU dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan narasumber bahwa perawatan serta pengembangan wisata bahari dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, sedangkan Pelindo turut berkontribusi pada rehabilitasi wisata mangrove yang perlu diperbaiki dan tidak ada kejelasan dalam pembagian anggaran, hal ini menimbulkan ketimpangan peran dan peran ganda karena tidak tertulis secara jelas tugas, hak, serta kewajiban yang akan dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, akses (*accessibility*) belum maksimal karena masih banyak pengunjung yang parkir sembarangan di kawasan sekitar pelabuhan dan regulasinya belum diatur lebih lanjut serta rute darat yang masih sulit dan membingungkan perlu lebih diutamakan untuk segera diatasi.

Berdasarkan analisa maka dapat disimpulkan bahwa peran *policy creator* dijalanya oleh Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III sebagian besar sudah berjalan cukup baik sesuai dengan konsep dan teori, akan tetapi akan tetapi dalam prosesnya alangkah baiknya seluruh OPD yang terlibat diberikan landasan berupa PKS agar tidak menimbulkan perbedaan mengingat peran yang dilakukan oleh Dispora cukup banyak sehingga perlu diberikan kejelasan mengenai kewajibannya. PT. Pelindo dan Pemerintah Kota Pasuruan dapat saling berkontribusi dalam mengatur evaluasi secara berkala, pembagian tugas dan wewenang sehingga tidak memberatkan salah satu pihak Selain itu, perlu mengatur lebih lanjut mengenai regulasi parkir kendaraan sehingga memudahkan akses menuju wisata bahari.

2. **Koordinator**

Dimensi peran kedua koordinator Nugroho (Handayani dan Warsono, 2017) teori peran *stakeholders* menjelaskan bahwa koordinator merupakan mengkoordinasikan antar aktor lainnya. *Stakeholders* yang memiliki peran dan berperan menjadi koordinator dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan adalah Sekretariat Daerah, Dinas PUPR dan DishuB dikarenakan kesesuaian dengan konsep atau teori dengan seorang koordinator.

Koordinator merupakan sebuah kegiatan mengkoordinasikan, yang memiliki makna merupakan tindakan atau kegiatan mengarahkan dan mengintegrasikan yang dapat menciptakan saling ketergantungan untuk melakukan kerjasama. Tentu saja hal ini akan tercipta adanya sebuah pengawasan kebijakan dan program yang telah ditugaskan. Adanya sifat saling ketergantungan karena suatu tugas atau penugasan yang diberikan kepada aktor kepada aktor lain untuk menjalankannya. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Crowston, 1997) dan (Reijniers, 1994) yang berfokus pada pendekatan koordinasi dan manajemen serta mengatasi sebuah hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama informan menunjukkan bahwa Sekda memiliki peran dan tugas untuk mengarahkan, menghimbau, menggandeng, dan mengintegrasikan dan memberikan tugas serta wewenang kepada OPD lainnya. Akan tetapi, dalam prosesnya terdapat hambatan yang tidak terduga berasal dari masyarakat berupa penolakan, karena adanya kesibukan masing-masing instansi serta sebagai OPD yang menjalankan teknis pembangunannya yang secara langsung bergesekan dengan masyarakat sehingga terjadi pelimpahan peran dari sementara dari Sekda ke Dinas PUPR untuk menyelesaikan suatu konflik di lapangan karena segala hal yang berkaitan di lapangan lebih dimengerti oleh Dinas PUPR namun tetap sesuai dengan arahan Sekda. Sedangkan untuk Dishub sendiri mengoordinir pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai yang tertera di PKS dan tetap mendampingi Dinas PUPR di lapangan. Sekda tetap menjadi koordinator utama namun untuk memberikan efisiensi harapannya setiap OPD dapat mengoordinir tugas dan kewajibannya sendiri di lapangan. Melihat hal tersebut adanya kesesuaian dengan konsep dan teori peran *stakeholders* koordinator.

Peran *stakeholders* sebagai koordinator tidak lepas dari adanya pengembangan wisata dari aspek daya tarik (*attractions*) seperti Dinas PUPR yang melakukan koordinasi penambahan *spot* – *spot* foto, membantu Dispora mengoordinir sewa perahu dan pembangunan taman baca. Perlu sinergitas antar OPD untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, jika dilihat dari aspek aksesibilitas (*accessibility*) Dinas PUPR juga berkoordinasi bersama Dishub untuk memudahkan akses menuju wisata bahari namun tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaksana seperti tukang parkir dan pelaku UMKM sehingga tetap berjalan tertib dan kondusif mengingat lokasi yang berbeda antara bagian depan pelabuhan yang di dominasi oleh pedestrian, sewa perahu, dan UMKM sedangkan bagian utara pelabuhan terdapat wisata mangrove dan taman baca, dan beberapa UMKM. Hal ini menjadi PR tersendiri bagi Dinas PUPR untuk berbenah kembali kedepannya agar akses menuju wisata bahari lebih terintegrasi dengan mudah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran dari Sekda maupun Dinas PUPR belum maksimal karena Sekda masih memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal dan mengawasi pengembangan wisata dibagian depan untuk parkir nya agar lebih kondusif dengan membuat regulasi sedangkan untuk dibagian belakang perlu ditinjau lebih lanjut mengenai akses bersama OPD lainnya sehingga akan lebih terarah. Untuk Dinas PUPR masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal koordinasi dengan masyarakat untuk meminimalisir adanya konflik selain itu, akses menuju bagian utara pelabuhan perlu adanya peningkatan sehingga tidak melewati *gang* – *gang* sempit pemukiman masyarakat serta bisa ditinjau dengan kendaraan lain yang lebih bisa memuat banyak orang, serta memaksimalkan lagi jalur laut namun, tetap berkoordinasi dengan Sekda dan masyarakat disana. Suatu peran yang ada pada *stakeholders* tidak dapat berjalan sesuai harapan tanpa adanya hubungan kolaborasi dan kerjasama yang saling mendukung satu sama lain.

3. *Fasilitator*

Dimensi peran *stakeholders* yang ketiga yaitu fasilitator Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017) pada teori peran *stakeholders* menjelaskan bahwa fasilitator adalah peran aktor yang menyediakan fasilitas atau pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran. *Stakeholders* yang berperan dan memiliki peran sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan adalah Sekretariat Daerah, PT. Pelindo Regional III, dan Dispora Kota Pasuruan. Ketiga *stakeholders* ini dapat dikatakan memiliki peran fasilitator karena peran atau tugas yang diemban sesuai dengan konsep atau teori dari fasilitator. Fasilitator yang dimaksud dalam hal ini merupakan peran aktor pemandu dalam proses atau aktor yang mempermudah suatu kegiatan untuk menjalankannya, hal ini sesuai dengan konsep fasilitasi dan fasilitator pada penelitian dari (Thomas, 2008).

Fasilitator pada dasarnya tidak hanya melakukan pemberian atau fasilitas berupa fisik namun juga berupa jasa. Fasilitator juga memiliki tugas yang harus dilakukan seperti memberikan kemampuan dengan berbagai cara termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan. Hal ini dapat dikatakan sebagai pemberian fasilitator di bidang jasa. Demikian pula dalam hal pendanaan dimana fasilitator dapat membantu mencari jalan keluar untuk dapat memberikan fasilitas yang berupa barang ataupun jasa, hal ini sejalan dengan penelitian dari (Nur dan Arif, 2021) yang berfokus pada peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan.

Pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan memiliki peran fasilitator dikarenakan tugas yang diemban memiliki kesesuaian dasar, konsep, dan teori dari peran *stakeholders* dimensi fasilitator. Sekda memfasilitasi berupa anggaran atau pendanaan dan memfasilitasi keperluan perizinan mengenai pendampingan dan pelatihan ke masyarakat untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk Dispora turut memfasilitasi secara teknis dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Melihat hasil wawancara bersama informan Dispora mengadakan pelatihan dan pendampingan rutin setiap 4-5 kali dalam setahun dengan mengundang masyarakat paguyuban di sekitar pelabuhan Kota Pasuruan yang ingin mencoba menjadi pelaku UMKM atau yang sudah lama di bidang UMKM. Dengan harapan adanya pelatihan ini dapat memudahkan masyarakat untuk membuat metode promosi yang kekinian, memajukan sentra kuliner masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Pasuruan.

Jika melihat dari aspek pengembangan wisata yaitu daya tarik (*attractions*) PT. Pelindo Regional III juga turut memfasilitasi pengembangan wisata bahari yaitu dalam kegiatan rehabilitasi nasional kawasan mangrove yang nantinya akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai wisata bahari mangrove dan taman baca. Dengan seluruh pendanaan dan pendampingan dengan masyarakat dari 5 kelurahan berbeda di sekita pelabuhan. Disini peran Pelindo bersinergi bersama Pemerintah Kota Pasuruan dan OPD terkait untuk meringankan atau memudahkan misi pemerintah sendiri guna menciptakan kawasan bahari yang ramah lingkungan. Selain itu, adanya pendampingan serta pelatihan ini membuat masyarakat merasa ikut dilibatkan pada prosesnya dan mengerti pentingnya menjaga ekosistem pesisir hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dan dokumentasi bersama informan.

Selanjutnya, fasilitator pastinya akan memberikan fasilitas atau memfasilitasi yang tentunya tidak terlepas dari aspek pengembangan wisata fasilitas (*amenity*). Dispora turut andil dalam menjalankan peran dalam pematangan konsep wisata yang pembangunannya dibantu oleh Dinas PUPR, dan suatu tempat wisata juga memerlukan fasilitas penunjang seperti toilet dan tempat sampah yang telah disediakan di wisata mangrove tujuannya untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan wisata dan memberikan kenyamanan kepada pengunjung wisata.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah, Dispora, dan PT. Pelindo sudah menjalankan peran sebagai fasilitator cukup bagus dengan Sekda yang memfasilitasi anggaran serta perizinan untuk memduahkan proses kerjasama ini mencapai tujuannya, untuk Dispora sebagai fasilitator teknis atau lapangan yang memfasilitasi pelatihan dan pendampingan secara rutin kepada masyarakat sekitar namun, tetap sesuai arahan dari Sekda, sedangkan Pelindo turut membantu mempermudah dengan ikut memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat serta bersinergi dengan pemerintah dalam rehabilitasi kawasan mangrove. Namun sebagai fasilitator dan menjalankan perannya disini para aktor masih memiliki kekurangan dalam menjalankan peran ini terutama dalam membangun fasilitas penunjang seperti tempat ibadah dan toilet yang dikeluhkan masyarakat di pelabuhan bagian depan atau pedestriannya. Mengingat kawasan itu lebih banyak dikunjungi wisatawan karena lebih mudah dijangkau aksesnya. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan anggaran dari Pemerintah Kota Pasuruan dan untuk saat ini

pembangunan memang masih dimaksimalkan dibagian belakang pelabuhan karena masih banyak kekurangan fasilitas yang harus dibenahi. Sehingga untuk mewujudkan fasilitas pendukung yang juga tertera pada PKS antara Dinas PUPR dan Pelindo memerlukan waktu untuk mewujudkannya.

Fasilitator tidak hanya memfasilitasi berupa fisik tetapi juga dapat berupa jasa dengan tetap memiliki tujuan yang sama yaitu mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan atau program tidak lain demi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, menjadi fasilitator tidak akan berhenti disini akan dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. *Implementor*

Dimensi peran yang keempat yaitu implementor Nugroho (Handayani dan Warsono, 2017) pada teori peran *stakeholders* menjelaskan bahwa implementor pada pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan yaitu Dispora, Dinas PUPR, unsur masyarakat (pelaku wisata, karang taruna, pelaku UMKM), semua OPD. Dispora dikatakan memiliki peran implementor dikarenakan peran atau tindakan yang dilakukan sejalan dengan konsep atau dasar dari implementor. Implementor dalam hal ini adalah pelaksana suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, hal ini sesuai yang disampaikan pada penelitian (Dolly, 2020), yang penelitiannya berfokus pada Program Gerakan Desa Membangun (GDM).

Selain berperan sebagai fasilitator Dispora juga berperan sebagai pelaksana pengembangan wisata melalui *branding* media sosial mengenai potensi wisata bahari, dalam mengenalkan wisata bahari Dispora juga berkolaborasi dengan OPD yang lain seperti Diskominfo, Dishub, Dinas PUPR, dan masih banyak lagi. Dispora bersama Dinas PUPR memberdayakan masyarakat dengan gencar mempromosikan sewa perahu untuk menuju wisata mangrove. Harapannya selain bisa mempermudah akses (*accessibility*) dari bagian pedestrian pelabuhan menuju wisata mangrove dan taman baca, juga dapat membantu ekonomi nelayan.

Dispora juga memiliki peran dalam pengembangan konsep penambahan daya tarik (*attractions*) wisata bahari melalui *spot-spot* foto serta memanfaatkan taman baca untuk berbagai event nasional maupun *event* tahunan sehingga masyarakat dan anak-anak lebih bisa mengenal potensi daerahnya dan meningkatkan literasinya. Peran aktor sebagai pelaksana pastinya juga dapat dilihat dari aspek fasilitas (*amenity*) fasilitas ini dapat berupa fisik maupun non fisik atau jasa. Bentuk pemberian fasilitas oleh implementor berupa jasa seperti sosialisasi bersama Dinas PUPR dan Dispora. Sosialisasi rutin yang diadakan Dispora juga nantinya akan menggandeng OPD lainnya, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nantinya mengenai rute menuju tempat wisata, memahami karakter *spot* wisata, dan lain sebagainya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama beberapa informan.

Peran *stakeholders* disini juga dilihat berdasarkan aspek pelayanan tambahan (*ancillary*) seperti pusat informasi wisata, pos keamanan, listrik, dan lain – lain. Ancillary juga termasuk hal – hal yang mendukung kepariwisataan seperti *tour guide*, *tourist informations*, dan lembaga pengelolaan. Pelayanan tambahan pada wisata mangrove yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam pembangunan pos keamanan karena merupakan syarat dari Gubernur dan Wali Kota untuk menjamin keamanan dan mewujudkan wisata yang ramah anak dengan penjagaannya dibantu oleh masyarakat karang taruna disekitar wisata mangrove.

Sedangkan untuk pemandu atau *tourguide* dan *tourist informations* diserahkan kepada TIC dibawah naungan Dispora yang nantinya akan dibantu oleh Diskominfo. Untuk masyarakat UMKM sendiri turut berpartisipasi langsung dalam menerapkan apa yang telah diberikan selama pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dari segi pangan dan promosi kuliner. Selain itu, masyarakat bisa menjual hidangan laut asli Kota Pasuruan untuk menarik minat pengunjung. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan wisata mangrove dan taman baca sendiri dilanjutkan kepada masyarakat karang taruna Kelurahan Ngemplakrejo, masyarakat juga dapat mengusulkan rencana pengembangan wisata penambahan *spot* wisata kepada OPD lainnya seperti Dinas PUPR, Dishub, dan Dispora.

Berdasarkan analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan telah dijalankan cukup baik oleh para *stakeholders* termasuk semua Organisasi Perangkat daerah dapat turut berpartisipasi dan saling berkolaborasi terlebih khusu penggerak utama yaitu Dispora melalui pendampingan atau sosialisasi dan pelaksana konsep pengembangan wisata dari aspek daya tarik (*attractions*), fasilitas (*amenity*), aksesibilitas (*accessibility*), dan pelayanan tambahan (*ancillary*) bersama TIC dan partner media seperti Diskominfo. Selain itu juga menggandeng unsur masyarakat (pelaku wisata dan UMKM) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari. Meskipun demikian pemerintah harus mulai lebih meninjau di kawasan pedestrian bagian depan pelabuhan yang belum terfasilitasi oleh pos keamanan, toilet dan tempat ibadah, *stakeholders* terkait

harus turut memberdayakan masyarakat karang taruna yang lain atau dapat mulai membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sehingga memudahkan dalam pengelolaan serta dapat menjembatani antara pemerintah dan masyarakat.

5. Akselerator

Dimensi peran yang kelima yaitu akselerator Nugroho (Handayani & Warsono, 2017) pada teori peran *stakeholders* menjelaskan bahwa akselerator merupakan kegiatan mempercepat dan membantu memberikan kontribusi pada suatu program sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran bahkan mempercepat target pencapaiannya. Percepatan dilakukan dengan elemen dukungan yang terbatas waktu dan dapat dilakukan dengan berfokus pada pemantauan, interaksi, pendampingan, pendanaan untuk menunjang percepatan yang pesat, serta memberikan dukungan relasi yang berkelanjutan diluar sebuah program.

Stakeholders yang berperan sebagai akselerator dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan yaitu Sekretariat Daerah, Dispora dibantu dengan partner media seperti Diskominfo dan TIC Kota Pasuruan. Sekda dikatakan memiliki peran sebagai akselerator karena turut menggerakkan OPD terkait, memberikan dukungan berupa pendanaan atau anggaran untuk memaksimalkan percepatan sesuai target sasaran kerjasama yang telah digagas. Akselerator tidak hanya dimaknai sebagai percepatan saja akan tetapi juga akselerator merupakan hasil dari suatu usaha atau tindakan yang tidak lepas dari kegiatan seperti pendampingan, pendidikan atau edukasi, dukungan kepada kelompok sasaran yang telah dilakukan penyediaan fasilitas oleh *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wright et al., 2015). Dispora sebagai akselerator turut menjalankan perannya melalui kegiatan promosi di media sosial seperti *Instagram* dan *TikTok* yang mana dapat mendorong pengembangan *spot* wisata yang dilakukan oleh masyarakat selaku pelaku wisata daerah Dispora juga menggandeng partner mediana seperti TIC yang dibawah naungannya dan Diskominfo untuk membantu kegiatan promosi.

Peran akselerator juga memperhatikan aspek pengembangan wisatanya jika dilihat dari daya tariknya (*attractions*) Dispora juga memanfaatkan event tahunan atau event nasional secara offline seperti Bandeng Jelak, Sedekah dan Petik Laut yang melibatkan semua OPD untuk berpartisipasi sekaligus untuk mempercepat pengenalan wisata bahari di Kota Pasuruan, selain itu Dispora juga membuka sarana *outing class* atau biasa dikenal *studytour* bagi pelajar yang ingin mengetahui lebih dalam sejarah serta potensi wisata di Kota Pasuruan, *outing class* ini dijalankan oleh TIC berupa pendampingan dan edukasi baik untuk masyarakat atau pelajar asli Kota Pasuruan maupun luar kota. Hal ini sesuai dengan konsep dari teori akselerator yaitu memberikan edukasi serta pendampingan.

Berdasarkan analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan telah dijalankan cukup baik oleh Sekda dan Dispora sebagai penggerak utamanya dibantu partner media. Hal ini dikarenakan sudah searah dan sejalan dengan konsep dasar akselerator yaitu terdapat hasil atau output dari pemberian fasilitas dan meningkatkan kenaikan jumlah wisatawan. Pelaksanaan ini sebagai bentuk menjalankan kerjasama yang telah dijalin. Akan tetapi, penyebaran potensi wisata bahari perlu dikenalkan lagi melalui banner atau baliho sehingga masyarakat bisa mengetahui ada wisata bahari di Pasuruan. Hal ini dikarenakan penyebarannya lebih efektif jika dapat dilihat secara langsung atau dengan *event offline* selain dari mulut ke mulut mengingat SDM masyarakat masih perlu ditingkatkan. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara bersama masyarakat sekitar. Meskipun demikian, yang mana sebagian besar pelaksanaan percepatan dalam pengembangan wisata bahari sudah cukup baik dilakukan masyarakat juga mulai mengenai potensi daerahnya sendiri, Kota Pasuruan memiliki destinasi baru selain wisata religi dan dapat menghidupkan lagi esensi dari pelabuhan tanjung tembikar.

Tantangan kedepan

Pembangunan kawasan pedestrian kerap mengubah aksesibilitas dan sirkulasi kendaraan bermotor yang selama ini menjadi moda utama masyarakat. Perubahan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu mulai menyusun regulasi, seperti penataan tempat parkir, agar tidak menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan pedestrian pelabuhan. Di sisi lain, sebagian masyarakat Kota Pasuruan belum memahami manfaat jangka panjang dari pembangunan pedestrian, seperti peningkatan kualitas udara, kesehatan publik, dan daya tarik wisata. Ketidaktahuan ini dapat menjadi hambatan dalam menerima dan mendukung kebijakan tersebut.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi baca dan digital guna memudahkan komunikasi antara Pemerintah Kota Pasuruan, PT. Pelindo, dan masyarakat lokal. Jika pembangunan kawasan pedestrian tidak dibarengi dengan penyediaan infrastruktur pendukung seperti tempat parkir yang memadai, fasilitas penyandang disabilitas, jalur sepeda, toilet,

dan tempat ibadah, maka masyarakat akan menganggap program tersebut kurang efektif dan hal ini berpotensi menurunkan minat wisatawan. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih mengenal potensi daerahnya sendiri serta membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama para stakeholders untuk mendukung pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas, pada bagian akhir skripsi ini peneliti menarik beberapa kesimpulan yang bisa diambil dan saran yang dapat diberikan berdasarkan pada temuan hasil penelitian. Peran yang dijalankan oleh *stakeholders* dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan sebagian besar telah dijalankan sesuai tugas dan fungsi dari masing – masing *stakeholders*. Sebagian besar peran dari *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator, telah dijalankan dengan cukup baik namun masih terdapat kekurangan dalam pengembangannya sehingga belum optimal. *Stakeholders primer* atau utama yang terlibat dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan yaitu Sekretariat Daerah, Dispora, dan Dinas PUPR Kota Pasuruan. Sedangkan untuk *stakeholders* sekunder yaitu PT. Pelindo Regional III, Dishub, unsur masyarakat (pelaku wisata, pelaku UMKM), dan partner media seperti Diskominfo dan TIC.

Peran *stakeholders* sebagai *policy creator* dijalankan oleh PT. Pelindo Regional III Surabaya dan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan sebagai wujud perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalankan perannya sebagai *policy creator* sudah bagus. Namun, masih terdapat kekurangan seperti MoU yang terlalu umum, draft PKS yang belum mewadahi semua OPD yang terlibat seperti Dispora yang hanya di dasarkan pada tugas dan kewajiban berdasarkan perintah dari Sekda serta masih ada poin pada PKS yang belum terlaksana seperti fasilitas penunjang karena kurangnya anggaran dana.

Peran koordinator dijalankan oleh Sekda, Dinas PUPR, dan Dishub. Pengembangan wisata juga menyentuh aspek daya tarik dan aksesibilitas yang memerlukan sinergi lintas OPD dan keterlibatan masyarakat. Namun, koordinasi yang dilakukan belum berjalan maksimal. Sekda perlu memperkuat pengawasan khususnya di area depan pelabuhan terkait parkir dan membuat regulasi yang lebih tegas, sementara untuk akses ke area belakang pelabuhan perlu evaluasi bersama OPD terkait. Dinas PUPR juga perlu meningkatkan koordinasi dengan masyarakat untuk mencegah konflik dan memperbaiki aksesibilitas, termasuk memaksimalkan jalur laut.

Peran fasilitator bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan atau aktivitas dari kelompok sasaran. Sekda memfasilitasi anggaran, perizinan, dan mendukung pendampingan masyarakat, Dispora memberikan pelatihan dan pendampingan rutin kepada pelaku UMKM, sedangkan Pelindo berperan dalam rehabilitasi kawasan mangrove dan pendampingan masyarakat sekitar. Meski demikian, masih terdapat kekurangan, khususnya dalam penyediaan fasilitas penunjang seperti tempat ibadah dan toilet di area depan pelabuhan yang ramai dikunjungi wisatawan. Keterbatasan anggaran dan fokus pembangunan yang masih diprioritaskan di area belakang pelabuhan menjadi faktor penghambat.

Peran *stakeholders* sebagai implementor dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan dijalankan oleh Dispora, Dinas PUPR, unsur masyarakat (pelaku wisata, karang taruna, pelaku UMKM), serta seluruh OPD terkait. Para implementor telah menjalankan perannya cukup baik dengan Dispora sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan program pengembangan wisata, mulai dari promosi melalui media sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pelaksanaan event dan sosialisasi rutin. Dispora juga aktif berkolaborasi dengan OPD lain seperti Diskominfo, Dishub, dan Dinas PUPR. Selain itu, Dinas PUPR melaksanakan pembangunan fisik seperti pos keamanan sebagai syarat wisata ramah anak dan aman, sementara TIC dan Diskominfo bertugas mendukung informasi wisata. Masyarakat turut terlibat aktif dalam pengelolaan wisata, promosi kuliner, hingga pengelolaan wisata mangrove dan taman baca. Meskipun implementasi berjalan cukup baik, masih ditemukan kekurangan khususnya di area pedestrian bagian depan pelabuhan yang belum memiliki fasilitas penunjang seperti pos keamanan, toilet, dan tempat ibadah. Peran *stakeholders* sebagai akselerator dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan telah berjalan cukup baik, dengan Sekretariat Daerah dan Dispora sebagai penggerak utama yang didukung oleh partner media seperti Diskominfo dan TIC. Sekda berperan sebagai akselerator dengan menggerakkan OPD terkait, memberikan dukungan anggaran, serta memastikan percepatan program sesuai target kerjasama yang telah dirancang. Dispora turut mempercepat pengembangan wisata melalui promosi digital di media sosial, pelaksanaan event tahunan seperti *Bandeng Jelak*, *Sedekah Laut*, dan *Petik Laut*, serta program *outing class* yang memberikan edukasi tentang potensi wisata daerah.

Peran akselerator juga diwujudkan dalam bentuk pendampingan, edukasi, serta dukungan fasilitas dan relasi berkelanjutan di luar program. Upaya ini berhasil memberikan output berupa meningkatnya jumlah wisatawan dan makin dikenalnya potensi wisata bahari di Kota Pasuruan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal penyebarluasan informasi wisata yang saat ini didominasi promosi digital.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti bermaksud memberikan saran dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT. Pelindo Regional III Surabaya dalam pengembangan wisata bahari di Pelabuhan Kota Pasuruan yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai *policy creator* oleh Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan PT. Pelindo Regional III, disarankan agar memperluas cakupan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada seluruh OPD yang memiliki keterlibatan aktif dalam pengembangan wisata bahari, termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) yang selama ini telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan tupoksi kewajiban seperti fasilitas penunjang yang belum terbangun sesuai pada PKS.
2. Sekda sebagai koordinator utama perlu menetapkan jadwal koordinasi berkala secara resmi baik dalam bentuk rapat evaluasi mingguan maupun kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pengembangan ke depan dengan pertemuan rutin 3 bulan sekali.
3. Sekda bertindak sebagai mediator utama jika terjadi gesekan antar OPD atau antara OPD dan masyarakat serta membentuk Tim Respons Cepat (TRC) lintas OPD untuk merespons dinamika lapangan.
4. Dishub dan Dinas PUPR dapat melakukan perencanaan jalur transportasi yang lebih terintegrasi, baik dari sisi darat maupun laut melakukan sosialisasi bersama nelayan pengadaan dan memberdayakan transportasi laut seperti sewa perahu nelayan serta menambahkan papan informasi mengenai tarif serta rute laut. Perlu adanya peta wisata serta papan informasi antara area pedestrian, wisata mangrove, taman baca, dan UMKM, agar pengunjung dapat dengan mudah memahami dan mengakses setiap spot dengan mudah.
5. Sekretariat daerah, Dispora dan Pelindo sebagai fasilitator disarankan mengalokasikan anggaran khusus wisata bahari dan jalin kemitraan swasta (PPP) atau mencari sponsor untuk bangun fasilitas dasar seperti toilet, tempat ibadah, dan tempat sampah. Pelindo juga dapat melakukan *capacity building* kepada masyarakat dalam bidang lingkungan dan ekowisata agar mereka menjadi mitra aktif dalam menjaga kawasan wisata.
6. Dispora Kota Pasuruan sebagai fasilitator disarankan menyesuaikan pelatihan UMKM dengan tren digital, libatkan pemuda/pelajar, dan jalin kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga vokasi. Evaluasi rutin program melalui forum *stakeholder*. Untuk mengoptimalkan peran sebagai akselerator, Dispora bersama partner media dapat melakukan promosi *offline* seperti melalui banner atau baliho yang dipasang di titik strategis.

REFERENSI

- Anggito, Albi Dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak
- Agustina, Y., & Pradana, G. W. (2023). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas. *Publika*, 11(3), 2107–2122.
- Agustiningsih, D. S., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Politik, I., & Surabaya, U. N. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Alun-Alun Melalui City Branding “Madinah Van Java” Di Kota Pasuruan (Studi Implementatif Kawasan Wisata Alun- Alun Kota Pasuruan). *Publika*, 12(1), 322–336.
- Aidhawani Aidhawani, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Database Karyawan Dalam Melakukan Perhitungan Penggajian Pada Percetakan UD Wahyu. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 41–46. <https://doi.org/10.61132/Manuhara.V1i3.52>
- Akbar, A. (2021). Analisis Minat Dan Perkembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga Futsal Pada Klub Opanindo Di Kota Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis*, 3(1), 6.

- Aldiansyah, S. Z., & Ma'ruf, M. F. (2024). Analisis Peran Aktor Dalam Kolaborasi Penyediaan Permukiman Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Program Dandan Omah). *Publika*, 12(4), 957–968.
- Alwan, M. H., & Pradoto, W. (2024). Analisa Stakeholder Dalam Penerapan Skema Land Value Capture Di. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 13(2), 114–123.
- Amerta, I. M. S. (2019). *Pengembangan Pariwisata Alternatif* (N. Azizah (Ed.)). ScopindobMedia Pustaka.
- Andrea, D. L. (2020). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(2), 157–165. <https://doi.org/10.46924/jihk.V1i2.128>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance. In D. Press (Ed.), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik* (1st Ed.). DAP Press.
- Bramana, S. R. (2018). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Di Kabupaten Jombang. *Ilmu Administrasi Negara*, 1–7.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Carlisle, S., Kunc, M., Jones, E., & Tiffin, S. (2013). Supporting Innovation For Tourism Development Through Multi-Stakeholder Approaches: Experiences From Africa. *Tourism Management*, 35, 59–69. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.010>
- Citrangsih, D. (2022). *Interaksionisme Simbolik : Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan*. 2(1), 72–86. <https://doi.org/10.47153/Sss21.3152022>
- Crowston, K. (1997). A Coordination Theory Approach To Organizational Process Design. *Organization Science*, 8(2), 157–175.
- Diantari, P. R., & IGI Agung Ulupui. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Dolly, F. I. (2020). Efektivitas Implementasi Program Gerakan Desa Membangun (Gdm) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bungo, Jambi. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.31334/Transparansi.V3i1.864>
- Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Ja'far Amir, ST., Iving Arisdiyoto, S.AP, M.AP., Nawang Aviani, S.S.T., M.A.P., Loso Judijanto, Ssi, MM, M, Stats., Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H., Heriyanto, S.Sos., M.Si, Otti Ilham Khair, M.Si., M.H., Yevi Dwitayanti, S, M.
- S. (2016). Otonomi Daerah Dan Good Governance. In A. Riwayati (Ed.), *CV. Mitra Mandiri Persada* (1st Ed., Vol. 4, Issue 1).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Method Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Method%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)
- Eko Prasetyo. (2020). Analisis Efektifitasimplementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Konteks Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholderengagement): Studi Kasus Program Revaluasi Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10(2), 1–16.
- Emerson, K., & Woo, M. I. N. (2022). Through Research Informing Practice Through Research. *Jurnal Collaborative Governance Regimes*, 1(1), 62–81.
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13.
- Febrianti, E., & Eprilianto, D. (2023). Analisis Peran Stakeholders Daerah Dalam Pengembangan City Branding “Lamongan Megilan.” *Publika*, 11(2), 1849–1862. <https://doi.org/10.26740/Publika.V11n2.P1849-1862>
- Gillovic, B., & McIntosh, A. (2015). Stakeholder Perspectives Of The Future Of Accessible Tourism In New Zealand. *Journal Of Tourism Futures*, 1(3), 223–239. <https://doi.org/10.1108/JTF-04-2015-0013>
- Glassida, A., Sihombing, A. Y., & Silvia, P. (2022). Perkembangan Otonomi Daerah Dan Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otda. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 441–

451. <https://Journal.Mediapublikasi.Id/Index.Php/Bullet/Article/View/2249%0Ahttps://Journal.Mediapublikasi.Id/Index.Php/Bullet/Article/Download/2249/998>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6,
- Heidelberg, S. H. (2022). Role Theory: Operationalization Of Key Concepts. *Journal Heidelberg University*, 16(1), 1–23.
- Hikmah, S. N., & Maskar, S. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Microsoft Powerpoint Pada Siswa Smp Kelas Viii Dalam Pembelajaran Koordinat Kartesius. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 1(1), 15–19. <https://doi.org/10.33365/ji-mr.v1i1.215>
- Hsb, A. L. I. M., & Julianthy, E. M. (2014). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 1–8.
- Insani, N., Aulia, P., Araniri, N., & Wardany, D. K. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa. *Jurnal Al - Mau'izhoh*, 3(1), 9–22.
- Irawan, N. C., Hartoyo, E., Suswadi, & Mustaqim. (2022). Environmental Management And Stakeholder Roles In Sustainable Tourism Development: A Feasibility Study. *IOP Conference Series: Earth And Environmental Science*, 1108(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1108/1/012068>
- J A M Reijniers, J. (1994). Organization Of Public-Private Partnership Projects: The Timely Prevention Of Pitfalls. *International Journal Of Project Management*, 12(3), 137–142. [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(94\)90028-0](https://doi.org/10.1016/0263-7863(94)90028-0)
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, 6(1), 56–70.
- Lahat, L., Sher-Hadar, N., & Galnoor, I. (2021). Introduction: Collaborative Governance. *Collaborative Governance: Theory And Lessons From Israel*, 1–24.
- Laia, Y., & , Martiman S. Sarumaha, B. L. (2024). Meningkatkan Kemampuan Belajar Mandiri (Panduan Untuk Mengembangkan Self-Regulated Learning). *Academia Publication*
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.